



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 09 November 2020

Halaman: 15

Dewan Usul, Becak Ditata Seperti Trans Jogja

YOGYA (KR) - Uji coba pedestrian Malioboro masuk hari keenam. Sejumlah protes terus datang. Salah satunya dari pengemudi becak motor (bentor) yang merasa dianaktirikan karena tidak diizinkan masuk ke Malioboro.

Hal tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Terkait lalu lintas di Malioboro, menurut Huda harus mendapatkan perhatian serius dari Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta dan terus dicarikan solusi terbaik. Karena tata kelola Malioboro itu tidak sekadar jalur pedestriannya saja. Tapi juga harus menata sistem transportasinya.

"Mengenai becak dan bentor itu menjadi problematika kita bersama. Kalau memang mau menjadikan Malioboro menjadi kawasan pedestrian, harus ditata sistem transportasinya seperti apa. Ini membutuhkan keseriusan. Baik dari segi anggaran maupun perencanaan. Tidak bisa kalau hanya setengah-setengah. Kalau tidak serius pasti akan begini terus," katanya,

Minggu (8/11).

Menurutnya, tidak manusiawi jika Pemda lantas mengesampingkan keberadaan bentor. Karena bisa dijadikan potensi pariwisata DIY. Huda mencontohkan Trans Jogja yang berawal dari banyaknya bus. Padahal saat itu subsidi yang diberikan cukup besar, mencapai Rp 100 miliar perbulan. Dan saat ini evaluasinya juga terus bagus.

Lalu kenapa urusan becak tidak bisa dibuat sama dengan Trans Jogja. Pemda bisa menawarkan skema subsidi bagi pengemudi becak. Diyakini Huda dananya juga tidak akan

sebesar saat Trans Jogja. Mungkin hanya 1/5-nya saja.

"Saya sudah menghitung. Dishub sudah memiliki rancangan untuk becak listrik. Nantinya pengemudi bentor dapat dialihkan ke sana dan dibuat shift kerja setiap delapan jam. Jadi mereka memiliki penghasilan tetap dan juga tarif becaknya juga dibuat sama," urainya.

Uji coba pedestrian rencananya akan berlangsung hingga 15 November 2020. Pemda DIY terus berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta yang secara rutin melakukan evaluasi mengenai uji coba ini. Salah satunya menge-

nai kebutuhan-kebutuhan kantong parkir bagi masyarakat yang mau masuk ke Malioboro namun membawa kendaraan pribadi.

"Sampai saat ini kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta mengenai kantor parkir. Hanya saja, sebanyak apapun kantong parkir tanpa dilakukan pengaturan lalu lintas maka tidak akan berhasil. Karena kunci untuk mewujudkan pedestrianisasi kawasan Malioboro adalah penataan lalu lintas. Baik dengan rekayasa maupun manajemen lalu lintas.

(Awh/Bro/Ira)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005